



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 259/HUMAS PMK/X/2021

Bansos Seperti "Balsem", Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Harus Komprehensif

*Menko PMK Dalam Launching BPJS Naker untuk Nelayan Kecil, Guru Ngaji/Sekolah Minggu, RT/RW di Kota Probolinggo

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial (bansos) saja.

Dia menerangkan, pendekatan untuk menangani permasalahan kemiskinan ekstrem harus secara komprehensif dengan banyak pendekatan. Muhadjir pun mengibaratkan bansos seperti "balsem", obat gosok untuk meredakan nyeri akibat cedera yang tidak akan mengobati penyakit.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan dalam acara "Launching Perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan Untuk Nelayan Kecil, Guru Mengaji/Sekolah Minggu, Ketua RT/RW, Pemberian Hibah Listrik Untuk Rumah Ibadah dan Pemberian Bantuan Sosial di Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat (28/10).

"Kemiskinan ekstrem tidak cukup diberi dengan bansos. Bansos itu kalau untuk tangani kemiskinan ekstrem seperti balsem. Jadi obat semua penyakit tetapi sebetulnya tidak menyelesaikan penyakit. Hanya menyelesaikan rasa sakitnya aja. Tetapi penyakitnya tidak selesai," kata Menko PMK yang kedatangannya mewakili undangan pada Presiden Jokowi itu.

Lebih lanjut, Menko PMK menyebut Probolinggo, khususnya Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem tinggi.

Berdasarkan data, di Provinsi Jawa Timur total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 114.250 jiwa penduduk miskin ekstrem berada di Kabupaten Probolinggo.

"Tentu saja karena Probolinggo ini kota dan kabupatennya satu tempat yang tidak bisa dipisahkan, maka sebetulnya kemungkinan juga ada miskin ekstrem di Kota Probolinggo yang jumlahnya cukup banyak," tuturnya.

Turut mendampingi Menko PMK Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dyah Wahyu Ernawati mewakili Gubernur Jawa Timur.

Menko PMK mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian Presiden adalah kemiskinan ekstrem di kalangan nelayan. Apalagi, Kota Probolinggo memiliki wilayah pesisir yang cukup luas.

Dia menyambut baik inisiasi Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin yang menginisiasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu kalangan nelayan.

"Sudah nyambung apa yang sedang kita lakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, dengan apa yang menjadi perintah Presiden, dan dengan apa yang diinisiasi Pak Wali Kota Probolinggo," jelasnya.

Muhadjir mengatakan, dengan adanya bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk kalangan nelayan akan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang belum sejahtera.

"Saya sangat senang sekali, menyambut baik sekali inisiatif cerdas Pak Hadi untuk memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan nelayan kecil," tuturnya. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**